

**DAMPAK REFORMASI BIROKRASI: EFISIENSI, TRANSPARANSI, DAN  
PELAYANAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK**



**MUHAMMAD REZA ZIDAN 2216041110**

**REGULER C**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2023/2024**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Istilah reformasi dapat dipahami sebagai suatu perubahan radikal yang bertujuan untuk memperbaiki (dalam bidang sosial budaya, politik dan agama) suatu masyarakat dan suatu negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990) pada masa mengikuti Yahezkel Dror (dalam Soesilo Zauhar, 1996). ), reformasi administrasi adalah perubahan yang dimaksudkan untuk menciptakan aspek-aspek kunci administrasi atau reformasi administrasi sebagai *The Artificial Inducement of Administrative Transformation Against Resistance*.

Pengertian lain menurut Irving Swerdlow yang dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1992) tentang reformasi administrasi publik adalah perubahan terencana dalam kinerja peran kelas penguasa (militer, birokrasi, partai politik dan lain-lain) dalam mencapai tujuan negara. Soesilo Zauhar menambahkan, reformasi di negara berkembang harus bersifat programatik. Reformasi akan efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan dan berkaitan dengan lingkungan di mana reformasi tersebut dilaksanakan. Perubahan terjadi pada birokrasi dan fungsinya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada sistem lain. Hahn Been dan Smonte dalam Soesilo Zauhar (1996) mengusulkan lima alat untuk mengukur reformasi administrasi publik, yang meliputi penekanan baru pada program, perubahan sikap dan perilaku masyarakat, Perubahan gaya kepemimpinan mengarah pada komunikasi yang lebih terbuka dan manajemen partisipatif, dengan menggunakan, sumber daya, serta mengurangi ketergantungan pada pendekatan hukum. Dalam Soesilo Zauhar (1996), Dror juga menyatakan bahwa tujuan reformasi administrasi publik adalah:

1. Efisiensi administratif, dalam arti menghemat uang
2. Mengatasi kelemahan dan penyakit penyelenggaraan negara
3. Memperkenalkan dan mempromosikan sistem penghargaan.
4. Menyesuaikan sistem ketatanegaraan untuk memenuhi kebutuhan pengaduan masyarakat yang semakin meningkat.
5. Mengubah pembagian kerja antara sistem ketatanegaraan dan sistem politik.
6. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk.

Reformasi adalah perubahan cara hidup lama, cara hidup baru ke arah yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan dan reformasi, termasuk memperbaiki tatanan kehidupan di bidang politik, ekonomi, dan politik hukum dan sosial. Dengan demikian, reformasi mempunyai rumusan atau gagasan tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru. Tujuan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004) adalah perubahan atau inovasi yang sengaja dibuat dan dilaksanakan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai agen perubahan sosial yang lebih efektif dan alat yang mampu lebih menjamin kesetaraan, kesetaraan politik, kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah:

- Struktur dan prosedur birokrasi
- Sikap dan perilaku birokrat, guna meningkatkan efektivitas organisasi atau membangun pemerintahan yang sehat dan menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Mosher (Leemans) berpendapat bahwa tujuan reformasi administrasi adalah untuk mengubah kebijakan dan program, meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengantisipasi kritik dan ancaman dari luar. Menurut Caiden (1969), tugas para pelaku reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja administratif individu, kelompok dan organisasi dan memberikan kontribusi terhadap sarana untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dalam hal perekonomian. dan lebih cepat.

Tujuan internal reformasi administrasi meliputi:

1. Efisiensi administrasi, dalam arti menghemat uang, dapat dicapai dengan menyederhanakan formulir, mengubah prosedur, menghilangkan duplikasi dan metode operasional organisasi lainnya.
2. Menghilangkan kelemahan atau kejahatan administrasi seperti korupsi, sistem patronase, pertemanan dalam sistem politik dan sistem lainnya.
3. Memperkenalkan dan mempromosikan sistem penghargaan, menggunakan PPBS, memproses data melalui sistem informasi otomatis, meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan lainnya.

Birokrasi adalah fenomena kehidupan, setidaknya sejak saat itu abad ke-19, telah menjadi tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Apabila orang ditanya tentang organisasi apakah yang paling mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang adalah hampir pasti birokrasi. Dari sebelum lahir sampai meninggal, manusia yang hidup di dunia modern selalu berurusan dengan organisasi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi. Seseorang dihadapkan pada birokrasi, sejak saat orangtuanya menikah di KUA. Dokumen surat nikah bapak – ibunya di KUA ini nantinya dibutuhkannya untuk mengurus akte kelahiran. Jadi selama manusia masih dalam kandungan, mereka pun demikian, meminta tes Puskesmas menjadi pembelajaran organisasi birokrasi. Terlebih lagi, ketika orang pergi ke sekolah, pergi bekerja, bepergian, berbelanja, dan melakukan aktivitas lainnya senantiasa pula berhubungan dengan institusi birokrasi Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Badan Pertanahan dan sebagainya. Ketika seseorang meninggal, mereka tetap harus pula memiliki kaitan dengan Pelayanan Pemakaman tidak lebih dari institusi birokrasi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan di era modern, birokrasi menempati posisi yang sangat penting dan selain menjadi organisasi yang paling penting (the most important dominant institution) dalam masyarakat. Hampir dapat dikatakan tidak mungkin proses kehidupan masyarakat modern berlangsung tanpa adanya intervensi peran birokrasi. Semua organisasi, yang dapat berupa organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga pendidikan, LSM, partai politik, jasa industri, perkumpulan seniman, dari pedalaman hutan sampai metropolitan, dari puncak gunung ke pantai, semuanya berada dalam lingkup kekuasaan dan pengaruh institusional birokrasi. Namun ironisnya, birokrasi adalah sebuah organisasi yang paling penting, itu juga sekaligus sebuah organisasi yang paling dibenci. Tidak heran banyak negara maju yang berbeda, hanya sebagian kecil dari masyarakat ingin bekerja menjadi PNS, selain karena gaji yang kecil, juga terutama karena buruknya citra birokrasi.

### Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dari tahun 2010 hingga 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah peta jalan untuk reformasi birokrasi nasional. Sasaran tahun berikutnya akan didasarkan pada sasaran tahun sebelumnya, dan sasaran tahun berikutnya akan mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Sasaran tahun berikutnya akan didasarkan pada sasaran tahun sebelumnya, dan sasaran tahun berikutnya akan mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Sekarang, tuntutan reformasi birokrasi bukan lagi hanya dari setiap anggota masyarakat yang menginginkan agar birokrasi khususnya paratur, menjadi lebih baik lagi. Sekarang, reformasi birokrasi juga dikenal sebagai reformasi gelombang pertama menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan. Ini telah meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk menciptakan good government, berbagai perubahan dilakukan pada sistem pemerintahan negara. Namun, banyak orang merasa bahwa reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibandingkan dengan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi untuk menciptakan clean government dan good government.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa cara pemerintah dalam menanggulangi dampak reformasi birokrasi yaitu:

1. Penyederhanaan Proses Birokrasi: Mempercepat proses pengambilan keputusan dengan mengurangi lapisan birokrasi, menghilangkan regulasi yang tidak perlu, dan memangkas prosedur yang berbelit-belit.
2. Penggunaan Teknologi: Meningkatkan efisiensi administrasi melalui penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi pemerintah yang terintegrasi, e-government, dan penggunaan big data untuk pengambilan keputusan.
3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi pegawai negeri melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk mempersiapkan mereka untuk tuntutan reformasi.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek pemerintahan untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan birokrasi dapat dilihat oleh masyarakat umum.
5. Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan mengawasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas.
6. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rutin: Evaluasi kinerja birokrasi berkala dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif reformasi yang dilakukan dan menemukan area yang perlu diperbaiki.
7. Peningkatan Pelayanan Publik: Fokusnya adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan mengurangi birokrasi yang mempersulit layanan dan menggunakan umpan balik masyarakat untuk perbaikan yang berkelanjutan.
8. Komitmen Kepemimpinan: Pemimpin pemerintahan harus memberikan contoh yang baik dalam mendukung dan menerapkan prinsip reformasi birokrasi.

9. Peraturan yang Mendukung: Menciptakan dan menerapkan peraturan yang mendukung reformasi birokrasi dan menghapus hambatan hukum yang menghambat efisiensi dan transparansi.

Langkah-langkah ini akan membantu pemerintah mencapai tujuan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

## **1.2 Fokus penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana reformasi birokrasi dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa aspek yang saya analisis disini meliputi efisiensi birokrasi, transparansi dan pelayanan publik. Selain itu juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan reformasi birokrasi dalam ketiga aspek ini, serta menganalisis dampak jangka panjang dari reformasi tersebut terhadap pemerintahan dan masyarakat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Reformasi Birokrasi telah memengaruhi efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik di berbagai sektor?
2. Apa dampak transparansi yang diperkenalkan oleh Reformasi Birokrasi terhadap akuntabilitas pemerintah dan pengawasan publik?
3. Bagaimana Reformasi Birokrasi telah memengaruhi kualitas dan responsivitas pelayanan masyarakat?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Menganalisis apakah reformasi birokrasi telah berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Mengidentifikasi dampak reformasi birokrasi terhadap masyarakat dan ekonomi, seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan investasi, atau penurunan tingkat korupsi.

Meneliti apakah reformasi birokrasi telah meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin menghambat keberhasilan reformasi birokrasi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka hasil dari penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan seperti:

**Efisiensi:** Dapat mengidentifikasi apakah reformasi birokrasi telah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pemerintah, seperti anggaran dan tenaga kerja.

**Transparansi:** Bisa menilai apakah reformasi telah meningkatkan tingkat transparansi dalam pemerintahan, misalnya, dengan mengukur ketersediaan informasi publik dan aksesibilitasnya.

**Pelayanan Masyarakat:** Dapat menentukan apakah reformasi birokrasi telah meningkatkan pelayanan masyarakat, baik dalam hal kecepatan, kualitas, atau aksesibilitas layanan pemerintah.

**Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan tentang dampak positif atau negatif dari reformasi birokrasi sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik.

**Evaluasi Kebijakan:** Memungkinkan pemerintah untuk secara sistematis mengevaluasi efektivitas kebijakan reformasi birokrasi yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

**Keterlibatan Masyarakat:** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi dengan memberikan bukti konkret tentang manfaat yang mereka terima atau masalah yang perlu diatasi.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dan saya menggunakan literatur sebagai salah satu sumber data atau sebagai bahan referensi dalam penelitian dampak reformasi birokrasi. Metode ini melibatkan analisis dengan berbagai jenis teks, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alya Fauziah & Wardana Joyce & Jacinta Rares Salmin Deng . (JAP No. 104 Vol. VII 2021) *DAMPAK REFORMASI BIROKRASI (Studi Tentang Restrukturisasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara)*
- Yusriadi & Misnawati . (2017) .Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik . *REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)*
- Intan Fitri Meutia, Ph.D . (2017) . *REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK*
- Bambang Supriyono . (2020) . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik . *Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer* . Universitas Brawijaya, Malang
- Neneng Siti Maryam. (2016) . Jurnal Ilmu Politik & Komunikasi, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* .